

TINGKAT PENGETAHUAN GURU BAHASA INGGRIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI PROVINSI RIAU TERHADAP KONSEP PENILAIAN BERBASIS KELAS SEBAGAI PEMECAHAN MASALAH UJIAN NASIONAL: SATU PENILAIAN

Fadly Azhar

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Abstract

This research is aimed at finding out the knowledge level of the state SMP teachers toward the concept of classroom-based assessment. The sample respondents were 297 English teachers taken from 11 cities within Riau Province. The procedure of the research was administered by sending a set of questionnaires containing statements on knowledge related to the concept of classroom-based assessment. Since the activities of this research was in relation to the concept of evaluation, the concept known as Context, Input, Process and Product (CIPP) created by Stufflebeam *et.al* (1971) was used. Data analysis was calculated in descriptive method using SPSS Version 11.5, that is, by describing the percentage, min score as well as the standard deviation. Data calculation described that the lowest min score was 3.2949 with the standard deviation 0.62731; while the highest one was 3.5539 with the standard deviation 0.52660. So, the interval of the min score was between 3.2949 and 3.5539. Therefore, it could be concluded that the knowledge level of the English teachers of state SMPs in Riau Province toward the concept of classroom-based assessment was in ‘mediocre’ level, particularly, on the aspects of introduction, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation.

Key words: *Pengetahuan, Penilaian Berbasis Kelas*

Pendahuluan

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) meliputi penilaian tulis, penilaian kinerja, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian sikap, penilaian diri dan penilaian portofolio. Ini berarti bahwa PBK menilai aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek kemahiran secara bersamaan. Secara umum, berbagai pakar penilaian menguraikan tentang PBK sebagai berikut. Boston (2002) mengatakan bahwa PBK berfungsi sebagai reaksi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang sudah dilaksanakan guru dan sebagai reaksi balasan pula bagi kompetensi siswa. Hal ini menurut Mistilina (2007) disebabkan oleh adanya *formative assessment* yang menggambarkan persepsi siswa tentang bahan pembelajaran. Sebagai tambahan, Leahy (2005) membincangkan bahwa PBK sebagai penilaian harian dan digunakan secara kontinu akan berfungsi sebagai informasi tentang semua yang sedang terjadi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, Tienken dan Michael (2001) menjelaskan perlunya pelatihan secara kontinu bagi guru dalam menggunakan konsep PBK bagi perbaikan pengajaran. Untuk itu, guru dan pihak dinas pendidikan, menurut McMilan (2000) wajib mengenal dan menerapkan “*eleven basic concepts*” tentang assessment tetapi guru mesti menentukan asas manakah yang merupakan struktur fundamental utama yang menghasilkan praktik pendidikan efektif dan memperbaiki pembelajaran diantaranya (i) proses keputusan yang professional, (ii) prinsip pengukuran bukti dan penilaian berkaitan, (iii) keputusan penilaian dipengaruhi oleh serangkaian tensi, (iv)

pengaruh motivasi dan belajar, (v) berisikan kesilapan, (vi) pengaruh pengajaran dan pembelajaran, (vii) proses yang syah, (viii) fair dan etis, (ix) penggunaan berbagai cara, (x) efisien dan layak, serta (xi) penggunaan teknologi computer.

Namun demikian, Mertler (2003) menjelaskan bahwa tidak terdapat tingkat signifikan antara penilaian melalui *paper-and-pencil format* dengan penilaian *web format*; sedangkan Mantero (2002) menjelaskan bahwa siswa yang menguasai tatabahasa belum tentu bagus dalam berkomunikasi; tetapi kecakapan berkomunikasi akan meningkatkan kemampuan tatabahasa. Oleh karena itu, Holmes (2001) berkesimpulan bahwa penilaian terhadap kurikulum nasional mestilah ditinjau dari berbagai pendekatan psikologis tidak cukup melalui formatif, diagnostik, summatif dan evaluatif; sedangkan Plake *et al.* (2004) berkesimpulan bahwa sistem penilaian bagi mata pelajaran sains perlu menggunakan model sistem PBK khusus yang dirancang untuk sains.

Seterusnya, Horst (2000) menjelaskan bahwa guru dapat melaksanakan PBK melalui aktivitas seperti *journal*, *learning logs*, dan *conferences* dalam menilai ‘oral skill’. Sejalan dengan hal ini, Lynn (2005) menjelaskan bahwa PBK bermakna, nyata, dan dapat digunakan sebagai asas dalam perbaikan kualitas tingkat pencapaian akademik siswa. Disamping itu, menurut Bronwen (2005), PBK membuat siswa belajar bersama secara aktif sehingga terdapat budaya belajar yang sama. Sementara itu, Baenen dan Chuck (2000) berkesimpulan bahwa PBK yang dilakukan di berbagai sekolah dalam satu kawasan tertentu sangat berperan dalam memperbaiki kemampuan siswa untuk mengikuti ujian nasional.

Di sisi lain, Pausch dan Mary (1999) berkesimpulan bahwa PBK bagi pendidikan tinggi amat diperlukan karena ia akan menggambarkan suatu akuntabilitas khususnya dalam hal akreditasi. Sementara itu, Stiggins dan Chappuis (2005) menjelaskan bahwa PBK adalah penilaian yang tidak saja membuat siswa produktif, percaya diri, tetapi juga menggambarkan potensi belajarnya. Sementara itu, Angelo (1991) menjelaskan bahwa tujuan PBK adalah menyediakan berbagai informasi yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pengajaran dan kualitas pembelajaran. Untuk itu, Haugen (1999) menjelaskan bahwa terdapat dua keuntungan PBK yaitu mengetahui pencapaian akademik siswa dan informasi tentang keefektifan metode yang digunakan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, Houghton Mifflin Company (1997) menjelaskan bahwa PBK adalah penilaian yang efektif dan efisien untuk menilai pencapaian akademik jika guru memfokuskan PBK pada *outcome* yang penting dalam kurikulum, menselaraskan dengan tujuan pengajaran, melaksanakan secara mandiri, menyatukan dengan aktivitas di dalam kelas melalui contoh-contoh, memeriksa hasil

kerja siswa, menilai portofolio, menentukan kriteria, membuat jadual penilaian portofolio, dan memulai PBK secara bertahap.

Dalam konteks pengembangan sikap dan penilaian diri, Beghetto (2004) berkesimpulan bahwa ‘*motivational beliefs*’ merupakan aspek yang menentukan orientasi sasaran penilaian sehingga penilaian aspek kepribadian siswa juga perlu dilaksanakan oleh guru. Sementara itu, Cheng *et al.* (2004) menjelaskan bahwa penilaian diri memainkan peranan penting dan terpusat pada aktivitas yang dilaksanakan oleh ESL/EFL instructors. Ini berarti bahwa PBK memberikan keuntungan dua arah yaitu guru-siswa dan siswa-guru. Sejalan dengan ini, Noonan dan Randy (2005) menjelaskan bahwa guru merasa penilaian oleh teman sejawat dan penilaian diri cukup bermanfaat bagi kelas besar sebagai strategi penilaian pencapaian akademik. Pendapat ini didukung oleh Malabonga, *et al.* (2005) yang menjelaskan bahwa 92% siswa mampu menggunakan instrument penilaian diri melalui computer untuk memilih tugas-tugas pada tingkat kesukaran tertentu. Seterusnya, Ross (2006) menjelaskan bahwa kekuatan penilaian diri dapat diperoleh dengan cara melatih siswa menilai secara mandiri kerja mereka tetapi guru mestilah melakukan pemantauan terhadap aktivitas ini. Namun demikian, Cheng dan Martin (2005) menjelaskan bahwa siswa mempunyai sikap yang kurang positif jika mereka diminta memberikan penilaian terhadap kemampuan lisan rekannya. Sementara hal yang berkaitan dengan penilaian portofolio, Forgette dan Marielle (2000) menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel proses dan masukan terhadap berbagai isu dalam pelaksanaan penilaian portofolio jika kerangka seleksi isinya secara generik disiapkan.

Lebih jauh tentang penilaian otentik yang lebih terkait dengan penilaian kinerja, Jia *et al.* ((2006) berkesimpulan bahwa guru-guru ESL menunjukkan persepsi yang tinggi untuk menggunakan *classroom-based reading assessment* sebagai sistem penilaian bagi pencapaian mata pelajaran Reading. Sejalan dengan ini, Dutcher (1990) menjelaskan bahwa bahan soal kecakapan membaca hendaknya bersifat otentik karena kemampuan membaca merupakan kemampuan independen dan fleksibel bagi tiap-tiap siswa. Untuk itu, Valencia (1989) menjelaskan bahwa penilaian otentik sangat berfaedah dan mudah untuk dilaporkan kepada masyarakat, komite sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua siswa karena penilaian otentik merupakan penilaian yang langsung dan nyata. Disamping itu, Quellmatz, *et al.* (1999) membincangkan bahwa dalam mata pelajaran sains, penilaian dapat difokuskan pada kinerja yang dilakonkan oleh siswa; dan Brualdi (1998) menjelaskan bahwa penilaian kinerja sangat diperlukan sebagai pendukung terhadap semua yang sudah diperoleh siswa melalui daya ingatnya; sedangkan Liang dan Kim (2004) menjelaskan bahwa untuk menilai kemajuan belajar khususnya

dalam hal kinerja yang dilakukan siswa, maka sebaiknya digunakan WebCT dengan cara menganalisa persepsi dan pengalaman pelatihnya.

Sebagai tambahan, Andrade dan Ying (2005) mengusulkan agar siswa senantiasa menggunakan rubric untuk mendukung kinerja akademik dan belajar. Untuk itu, Moskal dan Jon (2000) menjelaskan bahwa rubric sangat berguna dalam PBK sehingga penilaian terhadap setiap pengembangan rubric mestilah memenuhi tahap validitas dan reliabilitas rubric tersebut. Disamping itu, Tierney dan Marielle (2004) menjelaskan bahwa “banyak rubrik yang tersedia tetapi tidak berfungsi dengan baik dalam pengajaran dan pembelajaran karena rubrik tersebut tidak konsisten dalam deskripsi kriteria kinerja yang sesuai dengan tingkat kelas siswa.” Sejalan dengan hal ini, Mertler (2001) mengusulkan agar guru senantiasa menggunakan “analytic rubrics” (yaitu menilai proses dan produk secara terpisah dan bertahap) dan “holistic rubrics” (yaitu menilai proses dan produk secara menyeluruh) dalam menilai dan mengukur kinerja siswa sehingga pencapaian akademik siswa yang ditetapkan menggambarkan kinerja siswa yang sebenarnya. Untuk itu, Moskal (2003) menjelaskan bahwa proses pembuatan penilaian kinerja dan rubrik sama dengan proses pembuatan soal pilihan ganda yaitu menuliskan sasaran dan tujuan, membuat penilaian kinerja, membuat penilaian rubric, melaksanakan penilaian kinerja, dan menentukan nilainya. Lebih jauh, Moskal (2000) menjelaskan bahwa guru mesti menentukan jenis penilaian rubrik, kapan digunakan, dan bagaimana menggunakannya karena satu penilaian rubrik cukup berbeda dengan rubrik lainnya.

Di Indonesia, PBK digunakan sebagai suatu sistem penilaian pencapaian akademik siswa yang sejalan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 047/U/2002 tanggal 4 April 2002 Bab III Pasal 3. Keputusan tersebut menetapkan bahwa PBK berlaku pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keputusan ini didukung pula dengan panduan tentang PBK oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas tahun 2002. Untuk mendukung PBK ini, maka Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam bulan Oktober 2003, menerbitkan “Panduan Khusus Pengembangan Sistem Penilaian” untuk mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP; dan pada tahun 2006, Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas menerbitkan pula Pedoman Penilaian di Kelas yang mencangkup (i) penilaian tulis, (ii) penilaian kinerja, (iii) penilaian produk, (iv) penilaian proyek, (v) penilaian diri, (vi) penilaian sikap, dan (vii) penilaian portofolio.

Namun demikian, keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No:114/U/2001

menetapkan perlunya penilaian pencapaian akademik siswa secara nasional yang diperoleh melalui ujian nasional (UN). Pada mulanya keputusan Depdiknas mengenai UN ini tidaklah menjadi masalah bagi dunia pendidikan di Indonesia, jika memang tujuannya adalah untuk memantau, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan berskala nasional. Masalah yang muncul dalam kalangan siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat adalah bahawa UN hanya mengujikan beberapa mata pelajaran serta menentukan kelulusan siswa. Oleh kerana itu, berbagai fihak memberikan tanggapan, masukan, dan kritik terhadap UN seperti berikut.

Pertama, UN bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Standard Nasional Pendidikan karena menurut Tim Advokasi Korban UN (2006) dan Widawati (2006) bahwa UN tidak satu-satunya penentu kelulusan siswa. Sejalan dengan ini, UN mengekang otonomi sekolah karena kewenangan kelulusan berada pada fihak sekolah. Menyokong pendapat ini, Isjoni (2006) mengatakan bahwa UN tidak mesti dijadikan sebagai pengukuran untuk menentukan kelulusan. Disamping itu, UN kurang tepat dijadikan sebagai satu-satunya standard kelulusan karena menurut Hikmani (2006), UN hanya mengujikan tiga mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, dan Matematik. Kelulusan siswa mestinya juga melibatkan aspek etika dan kepribadian karena menurut Hasraf Sali (2006) UN tidak menghasilkan apa-apa dan hanya membuat siswa berfikir secara '*instant*'. Oleh karena itu, Widawati (2006) berkata bahwa lebih baik Depdiknas memberikan pengakuan dan penilaian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang sudah dilaksanakan siswa selama tiga tahun karena UN tidak mengukur kemampuan afektif dan kemahiran. Dalam perkataan lain, UN sebagai penentu kelulusan mestinya menguji semua domain pembelajaran: pengetahuan, sikap, dan kemahiran.

Seterusnya, Sudarmanto (2006) menjelaskan bahwa UN dapat dilaksanakan jika kepala sekolah, guru, orang tua murid dan siswa memiliki persepsi yang sama tentang UN tersebut; dan kepala sekolah perlu memantau dan menilai kemampuan guru yang mengajar mata pelajaran yang diujikan sehingga guru perlu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran karena standard kelulusan di Indonesia berada dibawah peringkat Singapura dan Malaysia. Disamping itu, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu Universitas Islam Riau (2006) dalam Dokumen 3 dan Dokumen 6 menyebutkan bahwa banyak guru Bahasa Inggeris di Provinsi Riau memiliki kecakapan yang rendah dalam uji kemampuan pasca pelaksanaan UN.

Selain daripada itu, Perwakilan orang tua siswa (2006) menyatakan bahwa salah satu kelemahan pelaksanaan UN di berbagai sekolah termasuk SMP Negeri di Provinsi Riau adalah bahwa guru dan pengawas ujian memberikan jawaban soal kepada siswa sehingga mengakibatkan pelaksanaan UN tersebut menjadi ternoda. Untuk memecahkan hal ini, Gubernur Riau Rusli Zainal (2007)

memberikan tanggapan bahwa polisi hendaknya bertindak tegas terhadap pelaku pembocoran soal UN. Seterusnya, hasil wawancara antara Berita Harian Riau Pos (2007) dengan pembaca menggambarkan bahwa terdapat 62% setuju; 17% kurang setuju; dan 21% tidak setuju dilaksanakannya UN jika digunakan untuk menentukan peringkat sekolah secara nasional bukan penentuan kelulusan. Jika UN dijadikan sebagai alat yang tepat untuk mengukur kualitas kelulusan, maka 35% mengatakan tepat; 24% ragu-ragu; dan 51% tidak tepat karena UN hanya mengukur tingkat pengetahuan saja.

Masalah lain yang menjadi perhatian bagi pembaca Berita Harian Riau Pos (2007) adalah bahwa 49% merasa sukar jika batas nilai kelulusan terendah adalah 5.00; 41% merasa sedang; dan hanya 10% merasa ringan. Perlu juga diketahui bahwa Depdiknas menaikkan nilai batas kelulusan menjadi 5.25 dan menambah tiga mata pelajaran lainnya untuk tahun akademik 2008 ini. Informasi ini membuat berbagai fihak khususnya siswa termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX Bidang Pendidikan tidak setuju jika batas lulus UN ditingatkan serta penambahan mata pelajaran yang diujikan (dalam Metro TV, 15 Agustus 2007). Sejalan dengan ini, Djauzak Ahmad (2007) menjelaskan bahwa “sistem pendidikan (di Indonesia) sudah bagus, kenapa hanya tiga mata pelajaran?” Dia berkesimpulan bahwa UN sebaiknya mengujikan seluruh mata pelajaran dan kelulusan siswa diserahkan kepada guru dan sekolah karena guru dan sekolah adalah ”penentu hitam putih generasi mendatang.” Menyokong pemikiran ini, Pandu Syaiful (2007) menjelaskan bahwa soal-soal yang diujikan dalam UN tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Depdiknas dalam kurikulum. Menurut Pandu Syaiful, UN lebih banyak mengujikan aspek kognitif sedangkan Depdiknas mengharapkan sekolah memberikan pengajaran dan pembelajaran yang mengarah kepada keunggulan lokal sehingga sekolah mempunyai “tingkat relevansi yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.” Oleh karena itu, kelulusan siswa kembalikan saja kepada sekolah yang menentukannya.

Sebagai tambahan, Burhan Gurning (2007) menjelaskan bahwa UN hanya untuk standar pendidikan. Ini berarti bahwa dengan diterapkannya UN, maka pemerintah dapat mengetahui sekolah mana yang masih tertinggal dan perlu melakukan perbaikan yang diperlukan sehingga sekolah-sekolah tersebut mempunyai taraf kualitas yang sama, tetapi mengapa menentukan kelulusan siswa? Inilah yang menjadi punca masalah bagi masyarakat hingga saat ini. Masalah lainnya tentang UN adalah tentang pelaksanaan Ujian Paket B untuk siswa SMP/MTs dan Ujian Paket C untuk siswa SMA/SMK/MA yang gagal dalam UN. Menurut Djauzak Ahmad (2007), penggunaan Paket B dan Paket C sebagai pengganti UN bagi siswa yang gagal merupakan tindakan yang menyimpang karena kedua macam paket ujian ini sebenarnya diperuntukkan bagi siswa pendidikan luar sekolah. Ujian paket seperti ini menurut Djauzak Ahmad hanya diperuntukkan bagi orang pernah bersekolah namun

tidak sempat menyelesaikannya disebabkan oleh faktor umur dan pekerjaan. Disamping itu, siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA akan tidak mau belajar bersungguh-sungguh menghadapi UN pada masa yang akan datang karena mereka juga akan mengikuti Paket B atau Paket C karena keduanya boleh digunakan untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Akibatnya, kualitas pendidikan di SMP/MTs dan SMA/SMK/MA akan cenderung menjadi rendah.

Seterusnya, berbagai pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau (2007) menolak diteruskannya pelaksanaan UN sebagai alat untuk menentukan kelulusan siswa. Mereka beralasan karena UN tidak dapat dijadikan sebagai ukuran kelulusan siswa dalam pendidikan. Mereka berkeinginan agar kelulusan siswa hendaknya ditetapkan oleh pihak sekolah; namun, mereka setuju kalau UN diganti dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Sejalan dengan penolakan UN ini, Aladin Koto (2007) berkesimpulan bahwa UN pada asasnya akan mengabaikan kualitas pendidikan itu sendiri. Alasan utama menurut pengamat pendidikan ini adalah bahwa berbagai peringkat sekolah tidak memiliki standard yang sama kualitasnya khususnya dalam kemampuan mengajar guru, fasilitas yang tersedia, serta kelengkapan sarana dan prasana. Oleh karenanya, pelaksanaan UN akan menyebabkan perbedaan yang berarti antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Disamping itu, Naguib Nasution (2007) memberikan dukungan terhadap keputusan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tersebut. Dia mengusulkan agar guru, siswa, dan orang tua siswa perlu melakukan gugatan *class action* terhadap kebijaksanaan Depdiknas guna menolak UN. Alasannya adalah bahwa UN tidak memberikan dampak yang berarti bagi kemajuan pendidikan siswa. Dia mengusulkan agar kelulusan siswa ditentukan melalui Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTAN) sehingga setiap sekolah memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam menentukan kelulusan siswanya. Oleh karena itu, sebaiknya penentuan kelulusan siswa diserahkan saja kepada pihak sekolah dengan cara melaksanakan PBK yaitu penilaian yang dilaksanakan secara kontinu dan menggunakan berbagai jenis penilaian.

Selain dari pada itu, Ahmad Sapari (2004) menjelaskan bahwa pelaksanaan UN hanyalah merupakan dua hal yang saling bertolak belakang yaitu di satu sisi, UN mesti dilaksanakan karena pemerintah ingin mencapai kualitas pendidikan tetapi di pihak lain, guru sudah menilai semua aktivitas siswa secara menyeluruh dan kontinu melalui PBK. Sebagai akibatnya, UN merugikan siswa karena hanya menilai kemampuan siswa pada saat ujian saja. Sejalan dengan ini, Ahmad Sapaat (2004) menjelaskan bahwa PBK adalah suatu sistem penilaian pencapaian akademik siswa yang sangat otentik sehingga PBK sudah saatnya untuk dipertimbangkan sebagai pendukung atau pengganti UN.

Seterusnya, PBK merupakan salah satu aspek yang dijelaskan dalam Kurikulum Berasaskan Kompetensi tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2006 tentang Standard Nasional Pendidikan mengatakan bahwa PBK merupakan alat untuk mengukur ketercapaian tujuan, kelancaran, efisiensi prosedur dan penentuan tingkat keberkesanan yang telah dicapai siswa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam perkataan lain, PBK merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran karena penilaian seperti inilah yang akan diketahui kualitas pencapaian akademik yang sudah diperoleh siswa. Disamping itu, PBK diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk menentukan apakah seorang siswa layak untuk naik kelas atau jika memungkinkan PBK berfungsi pula sebagai penentu kelulusan.

Sejalan dengan hal ini, Pusat Kurikulum (2005) dan Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional (2003) menetapkan PBK sebagai sistem penilaian resmi yang digunakan oleh setiap SMP dan MTs untuk menilai dan mengukur pencapaian akademik siswa; dan dalam penerapannya, PBK dilakukan secara terpadu dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta menggunakan berbagai jenis penilaian. Sebagai tambahan, Irwan Effendi (2009) menjelaskan bahwa UN belum mencapai tujuan yang sesungguhnya yakni menghubungkaitkan antara kelulusan melalui UN dengan kelulusan siswa dalam suatu jenjang pendidikan secara menyeluruh. Pakar ini juga merasa tidak setuju kalau hasil capaian UN dihubungkan pula dengan kecemerlangan guru, kepala sekolah, dinas pendidikan serta walikota dalam mengelola pendidikan sehingga dijadikan sebagai standard penempatan tugas mereka. Jika ini tetap dilaksanakan, maka ia bertentangan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional kerana ia hanya berperan sebagai alat evaluasi tingkat nasional dan bukan penentu kelulusan siswa diakhir masa pendidikan.

Seterusnya, untuk mengetahui tingkat pengetahuan guru tentang konsep PBK ini, maka teori asas mengenai pengetahuan perlu pula diuraikan dalam penelitian ini. Dimensi pengetahuan atau kognitif merupakan dimensi yang berkaitan dengan kemampuan berfikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, kemampuan yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran (Gronlund, 1976). Definisi ini menjelaskan bahwa dimensi pengetahuan adalah suatu dimensi yang sangat berperan dalam mengenal sesuatu objek yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang konsep PBK. Dimensi pengetahuan terdiri dari enam konsep yaitu konsep pengenalan, konsep pemahaman, konsep penerapan, konsep analisis, konsep sisntesis dan konsep evaluasi.

Konsep pengenalan adalah komponen asas dari dimensi pengetahuan. Untuk mengenal tingkat pengenalan guru mengenai konsep PBK, maka hal-hal yang ditanyakan adalah: (i) definisi PBK, (ii) ciri khusus PBK, (iii) peranan atau keunggulan PBK, (iv) PBK sebagai konsep penilaian otentik, (v)

prinsip pelaksanaan PBK, (vi) tujuan pelaksanaan PBK, (vii) jenis-jenis PBK, (viii) manfaat pelatihan Contextual Teaching and Learning bagi PBK, (ix) manfaat pelatihan Pembelajaran Terpadu Berasaskan Kompetensi bagi PBK, (x) manfaat pelatihan Penyusunan Prediksi UN bagi PBK, (xi) PBK sebagai suatu pendekatan, dan (xii) konsep peta perkembangan hasil belajar sebagai sasaran akhir PBK.

Konsep pemahaman merupakan aspek lanjutan dari aspek pengenalan. Dengan mempunyai tingkat pemahaman yang signifikan, maka guru SMP Negeri di Provinsi Riau akan mampu menentukan strategi yang tepat dalam melaksanakan PBK selama pengajaran dan pembelajaran. Hal-hal yang ditanyakan dalam konsep pemahaman ini adalah: (i) terminologi mengenai PBK, (ii) terjemahan terminologi mengenai PBK, (iii) tafsiran makna terminologi mengenai PBK, (iv) kesimpulan yang dibuat tentang terminologi mengenai PBK, dan (v) prinsip pelaksanaan PBK.

Konsep penerapan merupakan aspek lanjutan dari konsep pemahaman. Apalah artinya mempunyai tingkat pengenalan dan pemahaman yang signifikan jika guru SMP Negeri di Provinsi Riau tidak mempunyai konsep yang bermakna dalam menerapkan PBK dalam pengajaran dan pembelajaran karena konsep penerapan jauh lebih berat untuk dikuasai daripada kedua konsep sebelumnya. Konsep penerapan yang ditanyakan dalam penelitian ini adalah: (i) jenis-jenis PBK, (ii) prinsip PBK, (iii) jenis PBK yang selaras dengan tingkat kelas, (iv) langkah-langkah penyusunan jenis-jenis PBK, (v) dan PBK selama pembelajaran-pengajaran berlangsung.

Konsep analisis dapat disebut sebagai konsep yang diperlukan guru untuk mengdiskriminasi, membedakan, memilih, dan mengidentifikasi khususnya konsep, prinsip serta jenis-jenis PBK yang selaras dengan tingkat kelas yang diajar. Di pihak lain, guru SMP Negeri di Provinsi Riau juga diharapkan mempunyai kemampuan, dalam menentukan kekuatan dan kelemahan tiap-tiap jenis penilaian yang sesuai dengan kecakapan berbahasa, misalnya. Oleh karena itu, dalam konsep analisis ini, kemampuan yang ditanyakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan (i) PBK berdasarkan jenis-jenisnya, (ii) tiap-tiap terminologi mengenai PBK, (iii) konsep penyusunan test dan bukan test, (iv) konsep penilaian test dan bukan test, serta (v) rumusan penilaian test dan bukan test.

Konsep sintesis merupakan hal yang cukup berat untuk dilaksanakan. Salah satu alasannya adalah bahwa dalam melaksanakan PBK, guru diharapkan mampu mengutip dan menggunakan berbagai teori yang mendukung konsep dan prinsip tiap-tiap jenis PBK tersebut. Sehubungan itu, pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan kemampuan guru mengintegrasikan hal-hal seperti: (i) PBK

berdasarkan jenis-jenisnya, (ii) konsep-konsep PBK sebagai suatu kesatuan yang terpadu, (iii) konsep-konsep pendukung terhadap konsep-konsep yang sudah ada, (iv) bentuk-bentuk konsep penilaian dari berbagai sumber, dan (v) system penilaian bagi berbagai bentuk rubric penilaian.

Konsep terakhir yang perlu dikuasai adalah konsep evaluasi, menilai atau memberikan masukan, komentar dan kritikan terhadap konsep, prinsip serta jenis-jenis PBK yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian, guru diharapkan memberikan ulasan dan usulan yang tepat dan layak untuk digunakan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selaras dengan konteks ini, maka pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan (i) PBK berdasarkan jenis-jenisnya, (ii) PBK sebagai system penilaian hasil belajar, (iii) PBK sebagai suatu pendekatan dalam hal penilaian, (iv) PBK yang disusun dari berbagai sumber, (v) PBK ikut berperan sebagai penentu kelulusan, dan (vi) PBK berperan pula sebagai penyokong UN.

Metode Penelitian

Variable dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan guru bahasa Inggris sekolah menengah tingkat pertama negeri di Provinsi Riau terhadap konsep PBK yang ditelaah dari aspek-aspek (i) pengenalan, (ii) pemahaman, (iii) penerapan, (iv) analisis, (v) sintesis dan (vi) evaluasi. Populasi yang berjumlah 1230 orang, menurut Morgan (1980) cukup diambil 297 orang saja sebagai sampel dengan menerapkan Clustering Stratified Sampling Technique. di 410 SMP Negeri di Provinsi Riau. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tahun akademik 2008/2009 dan merupakan salah satu sub-variabel dari disertasi Program Doktor Falsafah Pendidikan yang sedang peneliti laksanakan di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sementara itu, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Sejauhmanakah tingkat pengetahuan guru bahasa Inggris SMP negeri di Provinsi Riau terhadap konsep-konsep PBK? Angket yang berpedoman pada skala Likert sebagai alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima pilihan yaitu: (a) sangat tidak mengetahui = 1, (b) tidak mengetahui = 2, (c) kurang mengetahui = 3, (d) mengetahui = 4, dan (e) sangat mengetahui = 5. Data yang diperoleh dianalisa melalui program SPSS Versi 11.5 secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pada aspek pengenalan terdapat 86 (29%) guru yang mengetahui konsep PBK, kurang mengetahui 188 (63.3%), tidak mengetahui iaitu 23 (7.7%) guru. Pada aspek pemahaman terdapat 2

(0.7%) yang sangat tidak mengetahui, 34 tidak mengetahui atau 11.4%, 181 (60.9%) kurang mengetahui, 79 (26.6%) guru mengetahui dan 1 (0.3%) guru sangat mengetahui konsep PBK. Pada tahap penerapan terdapat 1 (0.3%) guru yang sangat tidak mengetahui, 34 (11.4%) tidak mengetahui, 181 (60.9%) kurang mengetahui, 79 (26.6%) guru mengetahui dan 1 (0.3%) guru sangat mengetahui konsep PBK. Terdapat 2 (0.7%) guru yang sangat tidak mengetahui konsep PBK, 19 (6.4%) guru tidak mengetahui, 193 (65%) guru kurang mengetahui dan 83 (27.9%) guru mengetahui konsep PBL pada tahap analisis. Pada tahap sintesis, guru yang mengetahui konsep PBK hanya 65 (21.9%), 1 (0.3%) guru sangat tidak mengetahui, 29 (9.8%) guru tidak mengetahui dan 202 (68%) guru kurang mengetahui pelaksanaan PBK. Pada tahap evaluasi, terdapat 1 (0.3%) pula guru yang sangat mengetahui konsep PBK, Terdapat 27 (9%) guru yang tidak mengetahui dan 161 (54.2%) guru kurang mengetahui konsep PBK sedangkan 107 (36%) guru sudah mengetahui konsep PBK.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa min terendah adalah 3.2949 dengan standar deviasi 0.62731 dan yang tertinggi adalah 3.5539 dengan standar deviasi 0.52660. Bila dilihat dari min secara keseluruhan maka min tersebut berada dari 3.2949 hingga 3.5539. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan guru bahasa Inggris SMP negeri di Provinsi Riau berada pada tahap **sedang**. Oleh karena itu, para guru bahasa Inggris SMP Negeri di provinsi Riau disarankan agar meningkatkan pengetahuan mereka tentang konsep PBK secara bertahap; dan kepada Dinas Pendidikan agar senantiasa mengadakan berbagai pelatihan tentang PBK baik secara lokal maupun provinsi. Dengan demikian, PBK sebagai satu sistem penilaian pencapaian akademik siswa dapat diterapkan guru dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran.

Daftar Pustaka

Ahmad Sapaat, 2004. *Gunakan "Asesmen" Autentik, Pendekatan Pengganti UAN*. www.pikiranrakyat.com

Ahmad Sapari, 2004. *Ujian – Antara Esensi dan Komisi*. Kasi Kurikulum Sibdin TK/SD, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. www.kompas.com

Alaiddin Koto. 2007. *Riau Tolak Ujian Nasional*. Dalam Tribun Pekanbaru.

Andrade, H. and Ying, D., 2005. *Student Perspectives on Rubric-Referenced Assessment*. Practical Assessment, Research & Evaluation. Volume 10 No. 3. PARE. www.doaj.org. A peer-reviewed electronic journal. ISSN 1531-7714.

Angelo, A., 1991. *Ten Easy Pieces: Assessing Higher Learning in Four dimensions*. In *Classroom Research: Early Lessons from Success*. New directions in teaching and learning (#6), Summer, 17-31. Ww.sue.edu

Baenen, N. and Dulaney, C., 2000. *Can School District Classroom-Based Assessment Improve Performance on State Tests?* Wake County Public Schools, (http://www.wcpss.net/evaluationresearch/reports/2000/classroom_based_assessment.pdf)

Beghetto, A. R., 2004. *Toward a More Complete Picture of Student Learning: Assessing Students' Motivational Beliefs*. University of Oregon. Practical Assessment, Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=15>.

Boston, C., 2002. *The Concept of Formative Assessment*. Practical Assessment, Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.sp?v=8&n=9>.

Bronwen, C., 2005. *Student Commentary on Classroom Assessment in Science: a sociocultural interpretation*. International Journal of Science Education; 2/4/2005, Vol. 27 Issue 2, p199-214. (<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=1554788&sit>)

Brualdi, A., 1998. *Implementing Performance Assessment n the Classroom*. ERIC/AE. Practical Assessment, Research & Evaluatiton. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=6&n=2>

Burhan Gurning, 2007. *UN untuk Standard Pendidikan*. Pekanbaru; Riau Pos 20 Mac 2007.

Cheng, *et al.*, 2004. *ESL/EFL instructors' classroom assessment practices: purposes, methods, and procedures*. Faculty of Education Queen's University Kingston, Ontario K7L 3N6, Canada; email: cheng@educ.queensu.ca

Cheng, W. and Martin, W., 2005. *Peer assessment of language proficiency*. Department of English. The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong: email: egwcheng@polyu.edu.hk

Depdiknas, 2002. *Penilaian Berbasis Kelas*. Jakarta: Pusat Krikulum, Balitbang Departemen Pendidikan Nasional. Jalan Gunung Sahari Raya No. 4. 10710.

Depdiknas, 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama (SMP)*: Pedoman Khusus Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kemampun Dasar Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. Direktorat Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Depdiknas, 2003. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 047/U/2002 tanggal 4 April 2002 Bab III pasal 3 tentang Penilaian Berasaskan Kelas.

Depdiknas., 2006. *Standar Isi Kurikulum 2006*. Permendiknas RI No: 22 th 2006. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas, 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan*.

Djauzak Ahmad, 2007. *Sistem Sudah Bagus, Kenapa Hanya Tiga Mata Pelajaran?* Pekanbaru: Riau

Pos.

Dutcher, P., (1990). *Authentic Reading Assessment*. Practical Assessment. Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=2&n=6>.

Forgette, G.R. and Marielle, S, 2000. *Organizational Issues Related to Portfolio Assessment Implementation in the Classroom*. Practical Assessment. Research & Evaluation. PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=4.

Gronlund, E.N., 1976. *Measurement and evaluation in Teaching*. Third Edition. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.

Haugen, L., 1999. *Classroom Assessment Techniques* (CATs). Center for Teaching Excellence Iowa State University.

Hikmani, 2006. *Ujian Nasional Kurang Proporsional (Tepat) Jadi Standard Kelulusan*. Pekanbaru: Riau Pos, 3 Julai 2006.

Holmes, P., 2001. *Teaching, Learning and Assessment*. Peter Holmes RSS Centre for Statistical Education. peterholmes@ntu.ac.uk

Horst, M, 2000. *New Ways of Classroom Assessment. New Ways in TESOL Series II*. Volume 56, No. 4, June /July 2000.

Houghton Mifflin Company., 1997. *How Can Teachers Become More Effective and Efficient at Classroom-Based Assessment?*

Isjoni dan Hasraf Sali. 2006. *Sebaiknya Ujian Nasional Tidak Dilaksanakan*. Pekanbaru: Riau Pos, 20 Mei 2006.

Irwan Effendi, 2009. *Memaknai Ujian akhir Nasional*. Pekanbaru: Riau Pos, 7 Februari 2009

Jia, *et al.*, 2006. *ESL Teachers' Perceptions and Factors Influencing Their Use of Classroom-Based Reading Assessment*. Texas A&M University. (http://brj.su.edu/vol30_no2/art8.pdf.)

Leahy, *et al.*, 2005. *Classroom Assessment Minute by Minute, Day by Day*. Educational Leadership; 00131784, Nov2005, Vol. 63, Issue 3. Ebscohost. Academic Search Elite.

Liang, X. and Creasy, K., 2004. *Classroom Assessment in Web-Based Instructional Environment: Instructors' Experience*. University of Akron & Slippery Roc University. Practical Assessment, Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getn.asp?v=9&n=7>.

Lynn, O. 2005. *Classroom Assessment Stir Growing Global Interest*. Education Week; 10/5/2005, Vol.25 Issue 6, p8-8, 1p, 1c. (<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=18591302sit>)

Malabonga, *et al.*, 2005. *Self-assessment, preparation and response time on a computerized oral proficiency test*. Center for Applied Linguistics, Washington, DC. Edward Arnold Publisher.

Mantero, M. 2002. *Evaluating classroom Communication: In Support of Emergent and Authentic*

Frameworks in Second Language Assessment. Practical Assessment, Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=8&n=8>.

Mcmillan, J.H., 2000. *Fundamental Principles for Teachers and School Administrators.* Virginia Commonwealth University. Practical Assessment, Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=8>

Metler, A. C., 2001. *Designing Scoring Rubrics for Your Classroom. Practical Assessment.* Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=25>.

Metler A., C., 2003. *Patterns of Response and Nonresponse from Teachers to Traditional and Web Surveys* Practical Assessment, Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=8&n=22>.

Mistilina, S., 2007. *Supporting Change in Classroom Assessment.* Educational Leadership; Dec2006/Jan2007, Vol. 64 Issue 4, p76-79, 4p, 2c. (<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=23453043&sit>)

Morgan, 1980. Dalam *Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa.* Pekanbaru: FKIP-UNRI, 1984. Universitas Riau.

Moskal, M. B. and Leydens, A.J., 2000. *Scoring Rubrics Development: Validity and Reliability.* Practical Assessment, Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=10>.

Moskal, M. B., 2003. *Recommendations for Developing Classroom Performance Assessments and Scoring Rubrics.* Colorado School of Mines. Practical Assessment, research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=8&n=14>

Naguib Nasution, 2007. *Makin memberatkan. Mata pelajaran UN ditambah.* Dalam Riau Pos 10 desember 2007.

Noonan, B. and Duncan, R. C., 2005. *Peer and Self-Assessment in High Schools.* Practical Assessment, Research & Evaluation. A peer-reviewed electronic journal. University of Saskatchewan.

Pandu Syaiful, 2007. *Mendiknas Yang Garing.* Pekanbaru: Riau Pos

Pausch, et. al., 1999. Assessment of Information Literacy: Lessons from the Higher Education Assessment Movement. (source: www.ala.org).

Perwakilan Ibu-Bapak Pelajar, 2006. *Kemurnian UN SMPN 5 Diragukan.* Dalam Riau Pos 29 Mei 2006.

Plake, et al., 2004. *Classrom-based Assessment System for Science A Model.* Buros center for Tesing Univrsity of Nebraska-Lincoln. (<http://www7.nationalacademies.org/bota/Classroom-based-assessment.pdf>)

Pusat Kurikulum Depdiknas, 2005. *Buku Layanan Profesional seri Kegiatan Belajar Mengajar.* <http://www.google.com/search?q=cache:GANOpHzvFUJ:www.puskur.net>.

Quellmalz, *et al.*, (1999). *Performance Assessment Links in Science (PALS)*. Practical Assessment. Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=6&n=10>.

Ross, A. J., 2006. *The Reliability, Validity, and Utility of Self-Assessment*. Volume 11 No. 10. Practical Assessment, Research & Evaluation. ISSN 1531-7714. A Peer-reviewed electronic journal.

Rusli Zainal, 2007. *Tindak Tegas Pelaku Pembocoran Soal UN*. Pekanbaru: Riau Pos.

Riau Pos, 2007. *Ujian Di Ujian Nasional*. Pekanbaru.

Stiggins, *et al.*, 2005. *Using Student-Involved Classroom Assessment to Close Achievement Gaps. Theory Into Practice*. Winter 205, Vol. 44 Issue 1, p11-18, 8p. (<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=1669521&sit>)

Stufflebeam, *et al.*, 1971. *Educational Evaluation and Decision Making*. Hance, IL: Peacock.

Sudarmanto, W., 2006. UN Kurang Proporsional Jadi Standar Kelulusan. Pekanbaru: Riau Pos, 3 Julai 2006.

Tienken, C. and Michael, W., 2001. *Using State Standards and Tests to Improve Instruction*. Practical Assessment, Research & Evaluation. <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=13>

Tierney, R, and Marielle, S., 2004. *What's Still Wrong with Rubrics: Focusing on the Consistency of Performance Criteria Across Scale Levels*. Practical Assessment. Research & Evaluation.
<http://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=2>.